PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat | Hari: Minggu | Tanggal: 02 November 2014 | Halaman: 2

Integritas Modal Pemberantasan Korupsi

YOGYA (KR) - Peran aktif dan keterlibatan tiga unsur masyarakat, pemerintah dan swasta jadi penopang utama sebuah *good governance*. Sedang *good governance* sendiri merupakan unsur pokok yang menjadi kekuatan sebuah integritas di samping akuntabilitas dan transparansi.

"Integritas merupakan perwujudan satunya hati, pikiran dan tindakan. Dengan integritas inilah diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal," jelas Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat memaparkan materi pada Seminar Nasional ' Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam membangun Karakter Bangsa di Auditorium MM UGM, Sabtu (1/11).

Ditambahkan Haryadi, posisi Yogya sebagai kota budaya sebenarnya punya peran penting dalam melakukan pendidikan karakter masyarakat. Dengan kearifan lokal yang ada di Yogya, diharapkan bisa membentuk karakter kuat bagi seluruh elemen masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membendung laju korupsi yang makin menjadi.

"Karena itulah integritas sebagai salah satu pendukung karakter dan pribadi tangguh ini harus dimiliki. Sebagai salah satu contoh, seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Yogyakarta harus tunduk pada Pakta Integritas, termasuk pemberantasan korupsi," tegas Haryadi.

Sementara Hifdzil Alim dari Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM menyebut jika sektor pendidikan punya potensi korupsi yang tinggi. Dengan alokasi dana pendidikan yang digelontorkan melalui APBN sebesar Rp 400 triliun, tentu sangat rawan untuk dimanipulasi.

Beberapa hal yang terindikasi korupsi seperti perencanaan yang kurang maksimal hingga pengelolaan aset pendidikan yang kurang baik sehingga tidak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban ketika diminta.

"Padahal pendidikan merupakan kewajiban pemerintah atau negara pada warganya seperti yang diatur dalam UUD 1945. Tapi ternyata kasus korupsi banyak terjadi di sektor pendidikan dan melibatkan akademisi sendiri," sebutya.

Sedang Ketua Dewan Mahasiswa FH UGM Yuris Rizha Kurniawan mengatakan jika mahasiswa sebagai pemegang estafet agen perubahan punya peran strategis dalam pemberatasan korupsi dan pendidikan di masyarakat. Bahkan dengan power yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu jadi motor penggerak anti korupsi di dalam kehidupan bermasyarakat.

"Tapi yang perlu diingat, mahasiswa harus mengerti, memahami dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi tersebut untuk dirinya sendiri dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah panutan sebelum mengajak orang lain," katanya.

Pada kesempatan sesi sebelumnya, juga hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjabarkan bagaimana perwujudan peran pemerintah dan masyarakat serta pendidikan anti korupsi di lingkungan pemerintahan. (*5)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005